

2.9 Organisasi Nelayan dan Penyuluhan Perikanan

2.9.1 Organisasi Nelayan

Organisasi nelayan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu, KUD Mina, dan Kelompok nelayan. Sistem dan struktur organisasi ini akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.

(1) KUD (Kopersasi Unit Desa)

1) Diskripsi Umum

Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk dengan menggabungkan beberapa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dibawah Kepres No. 4 tahun 1984 dengan maksud untuk membentuk koperasi multi tujuan. BUUD adalah embrio dari koperasi desa untuk setiap kegiatan seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Pada saat operasional BUUD telah mencapai kemandirian, lembaga ini lalu ditingkatkan menjadi KUD. KUD dibentuk dan disupervisi oleh Departemen Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

KUD pada dasarnya mengembangkan prinsip kekeluargaan diantara anggotanya guna mencapai tujuan bersama (yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan standar kehidupan setiap anggota). Prinsip dasar KUD adalah: i) KUD dimiliki oleh anggotanya; ii) setiap anggota KUD harus berpartisipasi dalam pengelolaan KUD; iii) Pengelola KUD dipilih oleh anggotanya; dan iv) Distribusi keuntungan KUD berdasarkan kontribusi masing-masing anggota.

Keanggotaan koperasi berbasis perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, telah dewasa dan tinggal di wilayah setempat. Anggotanya terdiri atas petani, nelayan, pedagang, dsb. Pada awal keanggotaan, anggota harus membayar simpanan pokok yang dibayarkan pada saat menjadi anggota, membayar simpanan wajib dan mematuhi peraturan yang berlaku di koperasi.

Peran KUD adalah menciptakan suasana persaingan yang sehat untuk anggotanya dengan memberikan dukungan yang diperlukan. Ada tiga jenis dukungan yang diberikan oleh koperasi: dukungan kredit, teknis dan pelayanan. Dalam kaitannya dengan dukungan kredit, KUD dapat menyediakan dana investasi dan operasional kegiatan ekonomi anggotanya. Dalam hal ini, peran KUD mirip dengan bank, dimana anggota dapat meminjam uang dari KUD, dan KUD akan memberlakukan suku bunga tetapi jumlahnya lebih rendah dibandingkan suku bunga bank. KUD juga akan menerima uang dari anggota sebagai tabungan sukarela dan KUD akan memberikan bunga kepada anggotanya.

Terkait dengan dukungan teknis, KUD akan membantu anggotanya untuk mendapatkan teknologi baru dan yang lebih baik guna meningkatkan produktifitasnya. KUD juga akan menyediakan input seperti alat tangkap dan bahan mentah lainnya.

Peran lain KUD untuk anggotanya adalah dukungan pelayanan seperti pembelian dan penjualan produk, membuat kesepakatan dalam pengadaan input perikanan (peralatan tangkap, es, bahan bakar, dsb.) dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam penyediaan dukungan pelayanan, KUD akan bertindak sebagai pembeli dan penjual produk ikan dari anggotanya. Melalui peran ini, KUD akan melindungi anggotanya untuk menjual produknya ke pedagang perantara.

Ada tiga sumber utama modal KUD, yaitu i) modal sendiri ii) pinjaman dari bank, and iii) sisa hasil usaha. Modal sendiri berasal dari simpanan anggota yang terdiri atas simpanan

pokok, wajib dan sukarela. Simpanan pokok/wajib berasal dari anggota, jumlahnya sama untuk semua anggota dan simpanan ini tidak bisa diambil sepanjang menjadi anggota. Simpanan sukarela merupakan simpanan pribadi masing-masing anggotanya. Setiap sekali setahun, KUD memberikan jasa atas simpanan keanggotanya. Untuk pinjaman dari bank, KUD dapat berperan sebagai sebuah lembaga bisnis yang dapat meminjam uang dari bank guna mendukung modal investasi dan operasionalnya. Persentase tertentu dari sisa hasil usaha yang diperoleh KUD diberikan ke anggotanya dan sebagiannya ditambahkan sebagai modal.

2) KUD Mina di wilayah studi

KUD yang terkait dengan kegiatan perikanan diistilahkan dengan KUD Mina. Berdasarkan data statistik propinsi NTB & NTT, di wilayah studi terdapat sekitar 287 KUD (134 di NTB dan 153 di NTT) dengan total jumlah anggota sebanyak 448.038 orang (258.876 di NTB dan 189.162 di NTT), dan hanya 28 koperasi (10%) merupakan KUD Mina dengan jumlah anggota sebanyak 4.362 orang. Diantara 28 KUD Mina, 15 KUD Mina dengan anggota 3.231 orang ada di NTB, dan 13 KUD Mina dengan anggota sebanyak 1.131 orang ada di NTT. Laporan evaluasi KUD Mina tahun 2000 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengindikasikan bahwa di wilayah studi terdapat 4 persen dari seluruh KUD Mina di Indonesia, dan laporan juga menyebutkan bahwa diantara 28 koperasi, 17 koperasi aktif, tujuh tidak aktif dan empat telah berkembang menjadi koperasi yang mandiri. Namun, laporan tidak memberikan analisa yang kritis tentang performan, kelemahan, kegagalan, kekurangan, dan alasan koperasi yang tidak aktif (merujuk ke Tabel 2.9.1).

KUD Mina, secara umum, melakukan kegiatan atau berfungsi berdasarkan prinsip pembentukan dan tujuannya. Kenyataannya, koperasi tersebut tidak benar-benar menerapkan semangat kekeluargaan dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan anggotanya. Koperasi tersebut seperti kelompok kesejahteraan dimana melalui koperasi anggotanya mendapatkan subsidi dan kredit dari pemerintah dan mendapatkan kebutuhan hidup dengan harga yang lebih murah.

Umumnya tidak ada hubungannya dengan kegiatan perikanan, seperti produksi, pemasaran atau kegiatan penyediaan alat tangkap, bahan bakar, air, melalui koperasi. Walaupun kegiatan KUD Mina yang aktif, orientasi kegaitannya pada kegiatan simpan/pinjam, pelayanan telepon, dan penjualan barang komoditi sehari-hari yang terbatas, dan tidak ada kegiatan yang terkait dengan perikanan seperti pemasaran dan pengolahan ikan, suplai ikan dan bahan bakar, dsb. Ringkasan kondisi kegiatan sepuluh koperasi nelayan yang dikunjungi di wilayah studi diperlihatkan pada Tabel 2.9.2. Kegiatan mereka sebagian besar terpusat pada kegiatan kredit dimana modal awal diperoleh dari pemerintah, dan koperasi tidak memiliki dasar keuangan sendiri yang diakumulasikan melalui tabungan/simpanan anggota dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Walaupun beberapa kegiatan dilakukan, kegiatan tersebut tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggota dan tidak terintegrasi dengan pendaratan ikan, pemasaran, pengolahan dan suplai input penangkapan (bahan bakar, es, minyak, dsb.). Kekurangan ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yang diantaranya adalah kemampuan kepemimpinan yang kurang dan keterampilan menejemen dan pengalaman, kurangnya basis keuangan, dsb.

(2) Kelompok

1) Diskripsi Umum

Kelompok adalah perkumpulan yang diorganisir dan dibentuk berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian. Masyarakat nelayan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dimobilisasi dan diorganisir kedalam kelompok untuk menyediakan

bantuan teknis dan kredit Tujuan utama pembentukan kelompok di masyarakat nelayan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang perikanan juga untuk merubah kebiasaan mereka supaya menjadi mandiri dan mampu mengelola usahanya, meningkatkan produktifitas usaha guna meningkatkan pendapatan dan kualitas kehidupan mereka, memperkuat kelompok guna mengembangkannya menjadi koperasi.

Dalam mengembangkan atau membentuk kelompok ada proses yang diikuti. Masyarakat nelayan yang mempunyai potensi untuk berkelompok didentifikasi oleh petugas lapangan; Kepala Desa, tokoh masyarakat, dsb diminta petunjuknya untuk mendapatkan dukungan mereka dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat; dan kemudian pertemuan dengan masyarakat dilakukan termasuk juga tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas penyuluh perikanan guna mendapatkan kesepakatan untuk membentuk kelompok di wilayah tersebut.

Masyarakat nelayan dikelompokkan kedalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis kegiatannya seperti kelompok gillnet, kelompok purse seine, kelompok hand line, kelompok pengolahan, kelompok pemasaran, dsb. [Beberapa contoh adalah Kelompok Penangkapan, Kelompok Intam (Intensifikasi Tambak), Kelompok Mina Padi (Air Tawar), Kelompok Pengolahan, Kelompok Wanita Nelayan]. Setiap kelompok biasanya mempunyai anggota sebanyak 15 hingga 20 orang. Kelompok memiliki ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang mewakili peran pada setiap kegiatan seperti pemasaran, sosial, kredit/tabungan, kegiatan keagamaan, dsb. Setiap anggota berkewajiban membayar simpanan pokok dengan jumlah yang telah ditentukan bersama (misalnya Rp 250.000/anggota) dan simpanan wajib setiap bulan (Rp 250/bulan/orang).

Kelompok dikategorikan berdasarkan kemampuannya kedalam kelas, yaitu Kelas Pemula, Kelas Lanjutan, Kelas Madya dan Kelas Utama. Kepala Dinas perikanan kabupaten menilai kelas kelompok berdasarkan kemampuannya dalam perencanaan kegiatan usaha kelompok, menerapkan teknologi yang direkomendasikan, mengelola sumberdaya alam, melaksanakan dan mematuhi kesepakatan kelompok, mengakumulasi modal kelompok dan mengelolanya secara rasional, membangun kerjasama dengan kelompok yang lain dan dengan KUD. Untuk melegimitasi keberadaan kelompok dan kemajuannya, kelompok mendapatkan pengesahan sebagai berikut; Kelas Pemula disahkan oleh Kepala desa, Kelas Lanjut oleh Camat, Kelas Madya oleh Bupati; dan Kelas Utama oleh gubernur. Kelompok yang memiliki performan yang baik dan memenuhi persyaratan dapat dipromosikan menjadi koperasi perikanan setelah evaluasi dan mendapat persetujuan dari Dinas Koperasi.

2) Kelompok di wilayah studi

Di wilayah studi, terdapat 532 kelompok di NTB dan 619 kelompok di NTT. Diantara 532 kelompok di NTB, 364 (68%) adalah kelompok nelayan, 68 (13%) kelompok wanita, 68 (13%) kelompok tambak, 28 (5%) kelompok pengolahan, dan sisanya adalah kelompok usaha (lihat Tabel 2.9.2). Diantara 619 kelompok di NTT, 328 (53%) adalah kelompok nelayan, 118 (19%) kelompok budidaya air tawar, 84 (14%) adalah kelompok pemuda tani, 51 (8%) kelompok tambak, dan 38 (6%) adalah kelompok wanita (pengolahan) (lihat Tabel 2.9.3).

Walaupun sebuah kelompok diorganisir, dibentuk dan disediakan bantuan teknis dan peralatan yang cukup, dsb., performannya, prestasinya, dan perkembangannya sangat tergantung pada kunjungan rutin, pembinaan dan komunikasi dari institusi terkait dan petugas penyuluh lapangan.

2.9.2 Penyuluhan Perikanan

(1) Struktur

Penyuluhan Perikanan di Indonesia disatukan dengan pelayanan penyuluhan pertanian. Pelayanan penyuluhan direncanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penyuluhan Lapangan Latihan Pertanian (BPLLP), yang merupakan badan dibawah Departemen Pertanian untuk pelayanan terpadu, tetapi pemerintah propinsi bertanggung jawab atas administrasi petugas penyuluh tersebut. Pemerintah daerah, sebagai hasil desentralisasi, diharapkan memainkan peran yang besar dalam membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pelayanan penyuluhan termasuk pengalokasian dana penyuluhan. Akan tetapi, selama studi ini, status kebijakan, manajemen dan implementasi pelayanan penyuluhan belum berubah.

Kantor dinas perikanan propinsi dan kabupaten umumnya mempunyai jumlah staff yang cukup banyak, tetapi mereka tidak bertanggung jawab secara resmi untuk penyuluhan. Akan tetapi, petugas penyuluh perikanan adalah orang-orang yang saat ini dibawah koordinasi kantor perikanan propinsi dan kabupaten, yang secara administrasi dibawah departemen pertanian, mendapat gaji dari dana nasional dan propinsi.

Petugas penyuluh di sektor perikanan masih disebut sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Petugas Penyuluh spesialis (PPS). PPL biasanya lulusan sekolah menengah atas yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tiga bulan di pusat latihan dan pendidikan untuk pelayanan penyuluhan. PPS lulusan universitas di bidang yang terkait dan mendapat tiga bulan training khusus dibidangnya. Dibawah system yang baru, pengkategorian PPL dan PPS tidak akan ada lagi, dan petugas penyuluh akan dikategorikan menurut kepangkatan pegawai pemerintah. Klasifikasi baru adalah Penyuluh Trampil untuk pegawai yang menduduki golongan 3A dan Penyuluh Ahli untuk pegawai golongan 3B.

Laporan tahunan kantor perikanan mengindikasikan terdapat 112 orang PPL dan 18 orang PPS di NTB, dan 64 orang PPL dan 5 orang PPS di NTT. Petugas penyuluh ini berkantor di lembaga penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan tidak berbasis rutin, tergantung pada program yang telah direncanakan atau proyek dan ketersediaan dana melalui beberapa program. Contohnya, penyuluhan dan training tentang budidaya tambak nampaknya secara aktif dilakukan di NTB karena sebagai lokasi proyek pinjaman JBIC.

Sebagian besar lembaga yang terkait dengan pelayanan penyuluhan pertanian di tingkat daerah adalah DIKLAT, BIPP dan IPPTP, tetapi mereka mencakup sebagian aspek Perikanan.

1) DIKLAT

DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan), berlokasi di Mataram, merupakan pusat training tingkat propinsi untuk petugas penyuluh, berada di bawah BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) di Jakarta. Lembaga ini menyediakan training dasar dan lanjutan yang wajib untuk petugas penyuluh. Training lanjutan menekankan lebih banyak pada materi dan praktek lapangan. Keseluruhan masa training memakan waktu tiga bulan. Beberapa materi yang diberikan dalam training seperti prinsip dasar dan metodologi penyuluhan, tehnik komunikasi, materi tentang masing-masing sektor, formulasi program penyuluhan, pengembangan kelompok, pelaporan, dsb. Kurikulum tentang perikanan terbatas dan mencakup hanya tentang budidaya tambak dan air tawar.

Jadwal program training di DIKLAT satu kali atau dua kali dalam setahun tergantung pada ketersediaan dana. Saat ini, DIKLAT sedang melatih sekitar 120 orang untuk dana 30

orang petugas penyuluh; jadi DIKLAT menghadapi masalah pendanaan. Dana training berasal dari BPSDM dan pemerintah daerah. Kantor dinas masing-masing sektor menentukan staf yang memenuhi persyaratan untuk pelayanan penyuluhan. DIKLAT juga menyelenggarakan program pelatihan yang didanai oleh sumber lain seperti training wirausaha kerjasama dengan Angkatan Udara, P4K (peningkatan pendapatan petani kecil) dengan Dinas Pertanian dan pengendalian hama perkebunan kerjasama dengan IFAD.

Menurut Kepala DIKLAT, jumlah tenaga penyuluh yang memiliki latar belakang perikanan sangat sedikit karena sebagian besar lulusan sekolah perikanan atau akademi perikanan tidak tertarik menjadi tenaga penyuluh karena mereka cenderung memilih bekerja di sektor swasta seperti budidaya tambak, udang, dsb.

2) BIPP

BIPP (Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian) adalah pusat penyuluhan dan informasi pertanian di tingkat kabupaten. Peranan BIPP adalah untuk menyusun dan mengelola pelayanan penyuluhan dan institusi ini mempunyai beberapa station di kabupaten. Petugas penyuluh juga di latih dilembaga ini dengan menerapkan metode in-house trainers dan pelatuhnya berasal dari berbagai dinas dan pihak swasta.

3) IPPTP

IPPTP adalah pusat penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang berlokasi di Mataram, dan lembaga sejenis juga berlokasi di Kupang (NTT). Peran utama lembaga ini adalah untuk memobilisasi, koordinasi, dan membina kegiatan pengembangan dan penelitian berbagai instansi didalam negeri ke tingkat lokal. Lembaga ini juga melakukan penelitian tentang produk pertanian, percobaan lapangan dan menyediakan teknologi tepat guna, menyediakan saran dan petunjuk dan memformulasikan kebijakan pada sektor pertanian untuk pemerintah daerah. Secara administratif lembaga ini bertanggung jawab ke pemerintah pusat termasuk tentang pendanaan, tetapi kegiatannya bekerjasama dengan pemerintah daerah.

(2) Penyuluhan Perikanan dibawah Departmen yang baru

Departemen Perikanan dan Kelautan (MFMA) menyadari bahwa pelayanan penyuluhan sangat tidak mencukupi dan tidak sesuai, dan karenanya dibawah struktur administrasi yang baru telah dibentuk pusat untuk pendidikan, training dan penyuluhan perikanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sektor perikanan. Sekarang lembaga ini memfokuskan upayanya pada kegiatan budidaya perikanan dan kelautan dan akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan, training dan penyuluhan disektor perikanan. Tugas utama dari lembaga ini adalah untuk mempelajari dan memformulasikan kebijakan dan program untuk pengembangan sumberdaya manusia disektor perikanan secara umum dan juga penyuluhan; dan memformulasikan kebutuhan pendidikan, training dan penyuluhan.

Menyadari akan kebutuhan pelayanan seperti itu, sebuah survey menggunakan kuesner telah dilakukan oleh Departemen Perikanan dan Kelautan pada bulan Juli 2001 yang bertujuan untuk memahami kondisi penyuluhan perikanan di Indonesia saat ini. Selanjutnya, observasi langsung tentang keberadaan pelayanan penyuluhan perikanan di propinsi terpilih termasuk NTB telah juga dilakukan. Selanjutnya, seminar untuk menyampaikan temuan survey dan diskusi tentang kebutuhan untuk meningkatkan penyuluhan perikanan telah dilakukan pada bulan Agustus 2001.

2.9.3 Kredit Perikanan

Ada tiga skim kredit utama secara umum yang tersedia dari bank pembangunan daerah (BPD) untuk semua sektor termasuk perikanan, yaitu, kredit umum, program kredit dan penyaluran kredit.

(1) Kredit Umum

Kredit umum adalah kredit komersial yang tersedia untuk siapa saja yang mampu memenuhi persyaratan kredit yang diberikan pada tingkat suku bunga pasar.

(2) Kredit Program

Kredit Program artinya kredit yang diberikan dibawah program tertentu. Awalnya, sumber dana kredit ini berasal dari BRI (Bank Rakyat Indonesia). Pada saat ini berasal dari PT Permodalan Nasional Mandiri (PT. PNM). Lembaga ini mirip dengan BRI dengan peran untuk mendanai BPD (berdasarkan peraturan baru BI). Walaupun ada 17 jenis Kredit Program di BPD, saat ini hanya ada satu skim kredit yang tersedia yaitu KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah), kredit untuk usaha skala kecil dan menengah dari berbagai sektor termasuk perikanan. Persyaratank kredit ditetapkan oleh PT.PNM sementara BPD berperan sebagai lembaga penyalur. Kredit program kadang-kadang menerima dukungan keuangan dan manajemen dari IFAD, UNDP, ADB, WB, dan JBIC.

(3) Penyaluran Kredit

Sumber dana kredit saluran berasal dari yayasan dan sektor swasta. Saat ini, BPD mendapatkan dana kredit dari Yayasan Dakaf dan Departmen Koperasi. Dana ini diperuntukan untuk kredit bagi usaha kecil masyarakat miskin (Kredit Taskin) di semua sektor, seperti pertanian, dagang, kerajinan, dsb. Yayasan menetapkan persyaratan kredit dan menerima semua resiko yang terjadi atas kredit, sementara pengelolaan kredit, seperti persiapan proposal, persetujuan, monitoring, dan pembayaran, dilaksanakan oleh masing-masing Dinas. Contoh, Dinas Pertanian mengelola kredit usaha kecil di sektor pertanian.

(4) Pendanaan yang dapat diterapkan ke sektor perikanan

Disamping skim kredit umum diatas, kredit garis lain yang tersedia untuk nelayan adalah kredit berbasis koperasi (KUD Mina dan Koperasi Nelayan), Dana PEMP, P4K, PNT-GTZ, LSM dan JICA (Fukushi Shien Jigyou).

1) Koperasi Perikanan

Kegiatan simpan/pinjam koperasi perikanan (KUD Mina dan Koperasi Nelayan) merupakan salah satu sumber pendanaan yang tersedia ke anggota nelayan. Dana awal kegiatan kredit biasanya diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi; dimana koperasi yang menerima bantuan dana tersebut harus mengembalikannya dengan bunga. Suku bunga bervariasi dari 6 persen hingga 10 persen per tahun tergantung pada jumlah pinjaman dan periode pembayaran. Koperasi diharapkan untuk menggerakkan dana tersebut melalui bunga, tabungan anggota dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lain. Kredit yang berbasis koperasi ini hanya disediakan kepada anggota yang membutuhkan untuk menutupi biaya operasi penangkapan dan kebutuhan rumah tangga. Jumlah yang dapat dipinjam bervariasi dari Rp 100.000 hingga Rp 1.0 – 2.0 juta tergantung pada dana cadangan koperasi, dan suku bunga juga bervariasi dari satu hingga dua persen sebulan. Koperasi umumnya tidak mempunyai cadangan dana yang besar untuk mendanai pembelian kapal atau mesin, dsb. Pembayaran angsuran kredit dan tabungan juga merupakan masalah yang signifikan diantara

koperasi.

2) Kredit PEMP

PEMP singkatan dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Dibawah program ini, dana kredit dibangun pada tahun 2001 dibawah manajemen dirjen pulau-pulau kecil dan pesisir pada tahun 2001 dengan tujuan untuk membantu nelayan skala kecil yang terpengaruh sangat buruk oleh peningkatan harga bahan bakar. Dana untuk program ini berasal dari anggaran pemulihan akibat pengurangan subsidi bahan bakar. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui pengembangan kegiatan ekonomi mereka dan penggunaan sumberdaya pesisir secara sinambung. Pelaksanaan program telah dimulai pada ahir tahun 2001 dan mencakup 125 kabupaten di 30 propinsi; setiap kabupaten, tergantung pada lokasi proyek, mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 600 hingga 800 juta. Kredit hanya disalurkan ke kelompok dan tidak secara perorangan; jumlah kredit untuk satu kelompok dapat mencapai sekitar Rp 15 - 50 juta.

Pemilihan kelompok disetiap kabupaten dilakukan oleh kantor perikanan kabupaten (DFO) dan lembaga perantara atau konsultan manajemen (LEPP-M3). Lembaga perantara ini terdiri dari perwakilan masyarakat desa dengan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan asisten; lembaga tersebut juga mempunyai dewan pengurus yang terdiri dari kepala desa, staf dinas perikanan kabupaten dan LSM lokal. Pelaksanaan PEMP dikontrakkan ke LSM lokal yang bekerjasama sangat dekat dengan DFO dalam mengorganisir pembentukan kelompok dan pembentukan LEPP-M3. Konsultan manajemen dan kepala desa melakukan proses seleksi untuk mengidentifikasi peminjam; sementara beban kerja utama meliputi proses pengajuan usulan, seleksi dan mendokumentasikan kegiatan kredit dilakukan oleh konsultan manajemen, dan DFO memonitor pembayaran angsuran peminjam. Kreteria umum penyeleksian kelompok peminjam adalah: kelompok telah terbentuk minimal dua tahun, mempunyai rekening bank, mempunyai alat tangkap khususnya untuk kelompok tangkap, mempunyai motivasi untuk berkembang dan sejahtera, mempunyai anggota minimal 7 orang dan maksimal 15 orang dalam satu kelompok. 80 persen dana PEMP digunakan untuk dana kredit dan 20 persen untuk biaya administrasi dan pengelolaan; dimana 5 persen dari yang 20 persen tersebut untuk DFO dan sisianya 15 persen ke konsultan manajemen. Jumlah kredit ke kelompok tergantung pada skala usaha; pembayaran angsuran dilakukan bulanan dengan bunga 0,6% per bulan.

3) Proyek JICA

JICA-Jakarta membentuk dana kredit perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial masyarakat miskin yang bekerja sebagai buruh nelayan, meningkatkan pendapatan dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Ini adalah program satu tahun (April 2002 hingga Maret 2003) dan mencakup tiga kabupaten di NTT (Ngada, Lembata dan Alor). Dana kredit sekitar Rp 200 juta, dan disalurkan ke kelompok dan setiap kelompok akan menerima sekitar Rp 10 hingga 20 juta untuk pengadaan alat tangkap. Program ini dilaksanakan oleh LSM yang berbasis di Kupang (YAO) dan lokal LSM disetiap kabupaten lokasi program. Kelompok dibentuk dan mendapatkan bantuan kredit guna diperkuat secara finansial dengan mempromosikan tabungan, simpanan anggota dan suku bunga tahunan 9 persen.

4) P4K

P4K adalah program yang mempromosikan usaha ekonomi skala kecil dengan bantuan kredit yang berbasis kelompok, menargetkan masyarakat miskin desa; P4K singkatan dari Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil. Dilaksanakan

secara bersama oleh Departemen Pertanian dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Program ini menerima dukungan manajemen dan finansial yang signifikan dari IFAD, UNDP dan Pemerintah Belanda. Program mempunyai pendekatan pendampingan kelompok menggunakan kelompok swadaya kecil dengan 10 anggota dan memotivasi mereka untuk memilih usaha di pertanian atau non-pertanian (termasuk perikanan). Program secara langsung mempunyai fokus pada pengembangan keterampilan usaha kecil, penyediaan kredit dan mempromosikan tabungan. Selanjutnya, program mencoba untuk menghubungkan kelompok peminjam dengan kegiatan masyarakat dan pelayanan sosial. Program ini dilaksanakan diseluruh Jawa, Bali dan Lombok.

Di lapangan P4K dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan training pertanian (AAET) Departemen Pertanian, dengan menejer propinsi dan staf yang berlokasi di Badan pelatihan pertanian (BLPP) dan staf di tingkat kabupaten di pelayanan pertanian setempat dan petugas penyuluh lapangan (PPL). Petugas penyuluh lapangan mengidentifikasi masyarakat yang potensi untuk berpartisipasi dalam program berdasarkan tingkat pendapatan mereka dan kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil. Hanya rumah tangga dengan pendapatan per kapita tahunan dibawah nilai setara 320 kg beras yang diterima sebagai kelompok; rumah tangga yang memenuhi kriteria mengikuti program lalu dimotivasi untuk membentuk kelompok dengan anggota 8 hingga 16 keluarga. Kelompok harus memiliki tabungan minimal lima persen dari jumlah kredit yang akan dipinjam, dan harus berpartisipasi dalam dua sesi training yang disediakan oleh lembaga penyuluh.

NTB mendapat alokasi dana sebesar Rp 3.5 milyar untuk tahun 2002 dan jumlah kredit per kelompok sekitar Rp 3 juta. Setiap kelompok menerima satu pinjaman yang dibagi ke anggota kelompoknya. Kelompok mengasumsikan bahwa pertanggungjawaban bersama untuk pembayaran pinjaman. Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan dengan suku bunga 1 persen dan tabungan (wajib dan sukarela). Kelompok dapat mengajukan tambahan pinjaman dan syarat pinjaman berubah. Khususnya suku bunga meningkat hingga 2 persen per bulan dan jaminan diperlukan.

5) PNT-GTZ

Proyek dengan nama Promosi Keswadayaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Pedesaan Kritis di Nusa Tenggara (Self-Help Promotion for Low Income Communities in Critical Rural Areas in Nusa Tenggara (PNT)) telah menyelesaikan tahap 1 (1997-July 2002) dan berencana untuk masuk ke tahap 2 (Aug. 2002 – 2005). Proyek mengorganisir 1,138 kelompok swadaya yang terdiri dari 150,000 petani miskin, nelayan dan rumah tangga tanpa lahan di 6 kabupaten di NTB dan NTT. Salah satu tugas dari program ini adalah untuk menagih pinjaman yang telah diberikan ke masyarakat miskin di desa oleh program pemerintah yang disebut Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1996/97 dengan tujuan untuk membentuk kelompok simpan-pinjam. Pinjaman kelompok dibawah program IDT tidak dikembalikan karena kurangnya training dan pentunjuk ke peminjam. Sistem dana bergulir juga diperkenalkan dalam program PNT-GTZ untuk membangun tabungan yang transparan dan berfungsi baik serta sistem kredit dengan pembukuan dan akunting. Sumber dana bergulir untuk kegiatan kredit berasal dari tabungan kelompok yang diperoleh dari penjualan, kegiatan padat karya, dan bunga kredit. Suku bunga 18% per tahun.

6) Kegiatan kredit yang terkait dengan LSM

Ada beberapa LSM yang terlibat dalam sektor perikanan tetapi mereka bukan sumber pendanaan untuk nelayan. LSM biasanya dikontrak untuk memainkan peran antara dalam mengidentifikasi dan mengorganisir kelompok serta membantu pembentukan program kredit

dengan menggunakan dana kredit dari sumber yang berbeda. Contohnya, dibawah proyek ADB-Co-fish project, LSM lokal diminta untuk membantu pembentukan LKMP-lembaga kredit masyarakat pesisir di Lombok Timur. Dana awal sekira Rp 21 juta disediakan oleh proyek dan LKMP harus mengembangkannya lebih lanjut dengan mendapatkan dana kredit dari bank.

Skim pendanaan yang bisa diterapkan diatas berbasis kelompok yang menargetkan klien yang memiliki penghasilan rendah di daerah pedesaan. Skim tersebut berguna karena menyediakan pinjaman kecil dan melayani dengan baik mayoritas penduduk pedesaan yang miskin yang bisa menjamin mereka untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar dari bank komersial. Pembentukan kelompok swadaya ditekankan dengan tujuan untuk membangun bisnis yang berbasis kelompok. Anggota kelompok peminjam akan bertanggung jawab bersama untuk pengembalian kredit kelompok mereka.

(5) Pelajaran yang dipetik dari BPD dalam menyediakan kredit untuk masyarakat nelayan dibawah proyek GTZ

GTZ telah melakukan sebuah proyek yang bernama "Small Scale Fisheries Development Project in Lombok and Sumbawa" pada ahir tahun 70-an. Salah satu programnya, melalui skim kredit, adalah pembuatan kapal dan pemeliharaannya yang termasuk penyediaan sekitar 25 FRP kapal tangkap dan bengkel dengan spare parts untuk kapal, perbaikan mesin dan training untuk nelayan tentang kapal, pemeliharaan mesin dan perbaikan. Masyarakat nelayan di Labuhan Lombok telah terpilih dan beberapa kelompok dibentuk untuk program ini. Program ini bertujuan juga untuk memotivasi perguliran dana melalui akumulasi tabungan.

Tim pelaksana program (atau koordinator) terdiri dari wakil Dinas Perikanan, BPD dan GTZ dibentuk, untuk membina, menyediakan layanan penyuluhan, monitoring dan membantu dalam pengumpulan tabungan dan angsuran kredit. Selama masa awal implementasi, program berjalan dengan baik dengan keterlibatan pelaksana program. Program sangat berhasil dimana masyarakat membeli sebidang tanah dan membangun kantornya yang menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan. Setelah implementasi program, masyarakat kurang mempunyai hubungan dengan pelaksana program karena mereka telah keluar dari program. Karenanya, BPD dan Dinas Perikanan tidak dapat lagi memantau dan mensupervisi program tersebut dan juga tidak ada upaya untuk membujuk nelayan untuk membayar angsuran kredit karena tidak ada pernyataan yang jelas tentang siapa yang akan bertanggung jawab tentang program, Dinas Perikanan, Bank atau Proyek/GTZ.

Akibatnya, tidak ada lagi kegiatan di masyarakat, dan hanya tiga kapal tangkap yang beroperasi saat ini. Masyarakat tidak terorganisir lagi, tanpa kelompok, tanpa ketua, dan anggota memperebutkan kepemilikan lahan dan bangunan kantor yang telah dibeli dan didirikan. Pelajaran yang dipetik dari program ini adalah diperlukan lembaga pengelola yang efisien. Sangatlah esensial untuk membentuk dan mengembangkan lembaga pengelola di masyarakat yang mampu bertanggung jawab untuk kegiatannya dan memecahkan masalahnya. Di lain pihak, dukungan pemerintah juga diperlukan dalam kaitannya dengan petunjuk, monitoring dan supervisi.

Kasus seperti ini terjadi juga di tempat lain. Karena masyarakat umumnya gagal untuk membayar angsuran pinjaman untuk kapal, dan alat tangkap, modal operasional, dsb., bank dan bahkan Departemen Koperasi biasanya tidak berkeinginan untuk mendukung atau memberikan bantuan apapun ke koperasi nelayan.

2.9.4 Isu Pengembangan

(1) Organisasi Nelayan

1) Kelemahan KUD Mina

Konsep KUD mempunyai prinsip yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan karena sebagian besar mereka adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Namun, ada beberapa kelemahan khususnya dalam penerapan konsep, disamping berbagai masalah/isu yang dihadapi KUD. Kelemahan yang utama adalah keterampilan manajemen yang kurang dan karenanya, koperasi tidak memiliki pandangan bisnis atau keterampilan usaha dalam operasional dan kegiatannya. Hal ini dapat dihubungkan ke tingkat pendidikan anggotanya yang rendah. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memberikan training manajemen, khususnya kepada yang memegang jabatan manajemen, dan memperkerjakan seseorang yang profesional yang akan mengelola KUD dan pada saat yang bersamaan orang yang profesional tersebut harus mempersiapkan dan melatih anggota KUD yang akan memegang manajemen koperasi yang akan datang. Selanjutnya, pemerintah juga hendaknya terlibat lebih bersungguh-sungguh dalam hal memberikan bantuan awal kegiatan ekonomi dan memberikan petunjuk dan bimbingan, supervisi dan monitoring.

KUD umumnya tidak cukup berkembang untuk melakukan kampanye yang memotivasi penduduk untuk menabung di KUD. Sebagai persyaratannya, KUD hendaknya mengembangkan sebuah skim yang memobilisasi sumber daya desa dengan membangun kerjasama yang saling percaya dan menguntungkan di masyarakat, menyediakan keahlian manajerial khususnya tentang kredit/tabungan, menyediakan pelayanan pemasaran dan pengadaan, dan menyediakan fasilitas training untuk manajer /sekretaris KUD. Prospek memobilisasi simpanan sukarela tidak memotivasi karena pengalaman yang lalu tentang kesalahan penggunaan dana anggota.

2) Kelemahan Kelompok

Kelompok tidak dipantau secara cukup untuk memahami kondisinya atau diberikan bantuan teknis dan petunjuk oleh petugas penyuluh lapangan. Kunjungan petugas penyuluh tidak rutin (kemungkinan sekali dalam setahun) karena mereka sendiri juga mengalami kekurangan dan masalah.

Anggota kelompok yang diwawancarai di wilayah studi mengindikasikan bahwa kebutuhan modal untuk investasi dan operasional merupakan kendala utama disamping monitoring dan petunjuk yang rutin. Kelompok, pada umumnya, mempunyai keterbatasan atau tidak memiliki akses ke pelayanan seperti kredit kecil, pinjaman bank yang tergantung pada alokasi dana program dari pemerintah pusat atau daerah. Kurangnya akses ke kredit formal telah menyebabkan mereka mencari sumber kredit informal, dan mereka menjadi target pelepas uang/rentenir setempat.

Kelompok pada dasarnya menerima bantuan sehingga mereka tidak mempunyai inisiatif untuk mengembangkan diri dan untuk bekerja dengan semangat koperasi. Anggota dalam satu kelompok nampaknya bekerja sendiri tanpa bekerjasama dengan anggota yang lainnya. Jadi, kelompok dibentuk pada dasarnya mula-mula untuk menerima bantuan pemerintah seperti kapal tangkap dan alat tangkap, peralatan pengolahan, dsb dan kredit yang gampang.

(2) Kelemahan di pelayanan penyuluhan

Kelemahan umum di pelayanan penyuluhan perikanan disampaikan dibawah ini.

- Kelemahan dalam hal kelembagaan adalah kendala utama dalam pelayanan penyuluhan karena tidak ada seksi yang tepat dilingkup kantor perikanan yang bertanggung jawab untuk perencanaan, formulasi dan implementasi program penyuluhan.
- Kurangnya keterampilan tenaga kerja untuk penyuluh perikanan; hanya sekitar setengah petugas penyuluh yang ada saat ini yang mempunyai latar belakang perikanan, karenanya, mereka terbatas dalam hal fundamental perikanan. Mereka sebagian besar di latih untuk penyuluh pertanian.
- Sistem latihan dan kunjungan tidak dilaksanakan secara reguler.
- Stakeholders tidak terlibat dalam proses memformulasikan program penyuluhan.
- Tidak ada in-house training untuk petugas penyuluh.
- Materi perikanan di kurikulum training lebih banyak berorientasi pada perikanan darat.

(3) Kredit Perikanan

Isu yang dihadapi oleh kredit perikanan adalah sebagai berikut.

- Disamping beberapa skim kredit, pendanaan atau pinjaman yang tersedia untuk nelayan masih kurang, khususnya nelayan tangkap yang membutuhkan dana segera untuk menutupi biaya operasi penangkapan, pembelian kapal dan mesin, alat tangkap. Alasan utamanya adalah nelayan telah kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari lembaga sumber kredit seperti bank lokal.
- Kredit skala kecil yang berbasis koperasi hanya tersedia untuk anggota dan suku bunga yang berkisar dari 25% hingga 50% dan di beberapa kasus hingga 100%.
- Disamping sejarah yang panjang beberapa koperasi nelayan, koperasi tidak memiliki dana cadangan (modal) atau tabungan yang mencukupi untuk dimobilisasi ke nelayan untuk investasi. Mereka tergantung terlalu banyak pada bantuan pemerintah
- Anggota pada dasarnya tidak menyadari manfaat menabung dan tidak mempunyai kebiasaan menabung, disamping pembayaran angsuran pinjaman yang jelek dan macet.
- Tidak ada transparansi dalam pembukuan dan akunting dalam kegiatan kredit koperasi, dan ini adalah salah satu alasan jeleknya kesan koperasi nelayan dan rendahnya keanggotaan.
- Dalam kaitannya dengan kredibilitas nelayan yang rendah, pembayaran angsuran yang jelek dan macet, kredit berbasis kelompok dipromosikan untuk menjamin anggota kelompok bertanggung jawab bersama untuk pembayaran angsuran pinjaman.
- Kredit berbasis kelompok dipromosikan melalui bantuan lembaga perantara seperti LSM untuk mendukung kelompok dalam pelatihan dan bimbingan dan menjamin pembayaran kredit yang tepat dan penggunaan dana yang efektif serta pengembalian kredit.

2.10 Dampak Lingkungan

2.10.1 Otoritas Pengelolaan Lingkungan

Otoritas yang mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan dan EIA (Environmental Impact Assessment- Penilaian Dampak Lingkungan) adalah BAPEDAL (Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan), yang dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan KepPres No. 23. Sebagian kabupaten telah membentuk BAPEDALDA sendiri (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah). BAPEDALDA nantinya akan mampu untuk melakukan penilaian sendiri tentang persyaratan lingkungan/ laporan proyek dengan bantuan BAPEDAL propinsi jika dibutuhkan.

Petunjuk untuk menentukan dampak penting lingkungan pertama kali dibentuk berdasarkan Kep Ka-Bapedal No 56 tahun 1990, dan jenis usaha dan kegiatan yang membutuhkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau EIA diatur oleh Kep Men LH No 17 tahun 2001.

2.10.2 Persyaratan dan Prosedur AMDAL

(1) Persyaratan AMDAL

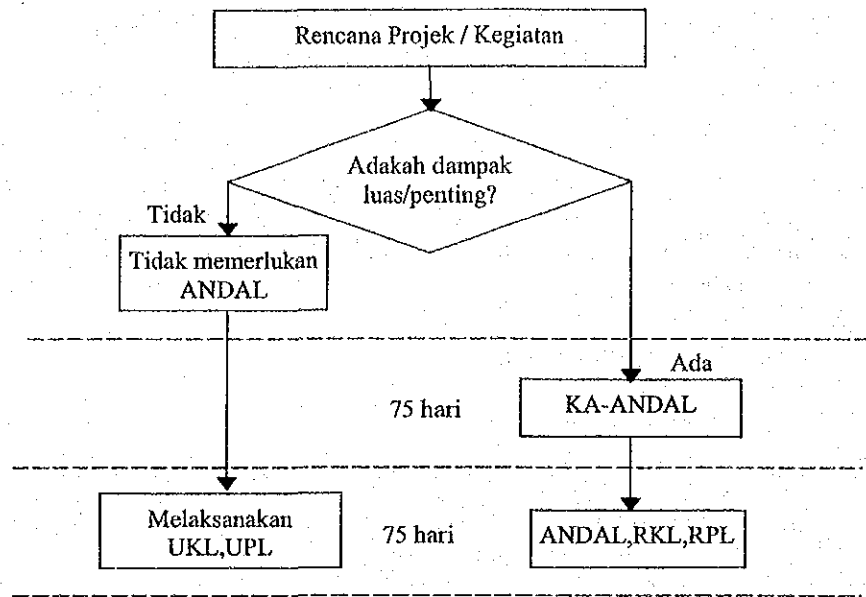
Pelaksanaan AMDAL mengacu pada undang-undang/peraturan berikut ini:

- Kep Ka-Bapedal No 56 tahun 1994: tentang petunjuk pada indikator dampak penting
- Kep Men PU 58/1995: Petunjuk tentang prosedur AMDAL
- UU No. 23 tahun 1997: tentang Pengelolaan Lingkungan
- PP (Peraturan Pemerintah) No. 27 tahun 1999: tentang AMDAL
- Kep Men LH 2/2000: Petunjuk untuk penilaian dokumen AMDAL
- Kep MenLH 4/2000: Petunjuk untuk AMDAL pada pembangunan kawasan terpadu
- Kep Men LH No. 17 tahun 2001: Jenis usaha dan kegiatan yang membutuhkan AMDAL
- Petunjuk Tehnis dimasing-masing instansi.

Selain peraturan/undang-undang diatas, terdapat pula peraturan yang bersifat sektoral yang diterapkan seperti penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, undang-undang agraria, pertambangan, kehutanan, perikanan, otonomi pemerintah daerah, penggunaan air sungai, dsb. Peraturan lintas sektoral bersama dengan keputusan presiden, peraturan menteri dari berbagai departemen seperti Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Industri, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Komunikasi , tenaga Kerja, Kesehatan, dsb. membuat undang-undang lingkungan Indonesia kompleks dan sulit untuk dikoordinasikan dari sumber yang beragam seperti itu khususnya saat undang-undang tersebut diberlakukan lebih lanjut di tingkat propinsi dan kabupaten dengan keputusan gubernur.

(2) Prosedur AMDAL

Prosedur untuk menentukan apakah sebuah proyek membutuhkan EIA atau tidak, di gambarkan seperti berikut ini:



Proyek yang tidak membutuhkan EIA diharuskan untuk melengkapi UKL (Upaya Kelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) yang berisikan tentang indikator untuk mengurangi dampak yang diharapkan dan memantau dampak-dampak tersebut. Dokumen UKL dan UPL dikirim ke instansi terkait dan terlibat dalam monitoring.

EIA diterapkan hanya pada proyek-proyek yang berskala besar, kompleks yang secara potensial menyebabkan dampak penting, juga pada kegiatan-kegiatan yang membahayakan wilayah yang dilindungi atau yang rawan. Skala kegiatan yang membutuhkan EIA diatur dalam Kep Men LH No. 17 tahun 2001. Untuk sektor yang terkait dengan perikanan, aturan ini berlaku pada:

- Pembangunan tambak budidaya udang/ikan ≥ 50 ha
- Pembangunan kandang permanen, yang berlokasi di;
 - Wilayah perairan darat, ≥ 2.5 ha, atau ≥ 500 unit
 - Laut, ≥ 5 ha, atau ≥ 1000 unit

Pembangunan kompleks Perikanan, pelabuhan selain yang bertujuan untuk pelabuhan umum, yang berciri:

- Panjang tiang, ≥ 300 m
- Area industri perikanan ≥ 10 ha
- Kedalaman Jetty ≥ -4 m LWL (tinggi air terendah)

AMDAL terdiri atas:

KA- ANDAL	TOR atau skop dampak lingkungan yang akan dianalisa
ANDAL	Analisa yang teliti dan mendetail tentang kemungkinan dampak luas dan penting yang akan timbul dari kegiatan yang direncanakan
RKL	Pemecahan masalah/upaya yang akan diterapkan terhadap dampak luas dan penting yang akan muncul karena pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
RPL	monitoring yang akan dilakukan terhadap dampak luas dan penting yang akan muncul karena pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

2.10.3 Isu Lingkungan Utama di wilayah studi

Beberapa isu lingkungan yang menonjol di sektor perikanan di wilayah proyek adalah:

- Penangkapan ikan menggunakan bom yang mengakibatkan kerusakan karang dan habitatnya
- Pengambilan karang untuk produksi kapur, bahan bangunan, dekorasi.
- Pengambilan bakau untuk kayu bakar, produksi kapur dan bahan bangunan,
- Penangkapan ikan dengan racun dan pengrusakan tehnik penangkapan dan alat tangkap
- Kondisi lingkungan hidup masyarakat nelayan yang jelek (kurang air bersih dan air minum, sanitasi lingkungan hidup yang kurang, kurangnya fasilitas kamar mandi dan WC, dsb.)

Rendahnya pendapatan masyarakat nelayan dan kurangnya kegiatan alternatif untuk menambah pendapatan mendesak masyarakat nelayan untuk melakukan praktek penangkapan yang tidak lestari. Banyak orang di masyarakat yang sadar akan dampak dari praktek atau tehnik yang merusak tersebut dan akibatnya mereka kesulitan untuk menangkap ikan, namun tidak ada alternatif kegiatan untuk mencari nafkah atau untuk mendapatkan pendapatan, maka mereka diharuskan untuk melanjutkan siklus pengrusakan dan penurunan tersebut.

Penurunan kualitas lingkungan laut berdampak pada sumber daya perikanan dan selanjutnya pada kehidupan masyarakat nelayan. Tanpa pengawasan yang efektif, penegakan hukum terhadap praktek yang illegal, dan pengelolaan sumberdaya yang menyakinkan, dan masalah yang sejenisnya semakin memburuk.

Kendala institusi tentang pengelolaan yang sinambung termasuk: kewenangan yang tidak jelas secara institusi diantara lembaga/departmen yang terkait dalam menghadapi masalah menejemen; kerangka kerja formal yang rumit dan kebijakan yang lemah; penegakan hukum yang lemah; informasi dan dukungan penyuluhan yang tidak cukup.

Di tingkat masyarakat, beberapa faktor sosial yang menghalangi praktek yang lestari adalah;

- Kurangnya alokasi hak dan tanggung jawab tentang sumber daya pesisir sebagai sumber daya yang dianggap tempat umum dan terbuka dengan akses yang bebas untuk dieksploitasi/dirusak.
- Nelayan luar atau nelayan pendatang dipersalahkan melakukan praktek penangkapan yang merusak. Beberapa orang berlagak sebagai “bos” yang membiayai kegiatan tersebut dengan mengkontrak orang setempat sebagai awak kapal. Ketakutan akan keterlibatannya juga menghalangi orang setempat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib.
- Mudah dan murah biaya untuk membuat bom dan penangkapan yang menggunakan racun mendorong anak-anak muda untuk melakukan kegiatan tersebut. Tingginya biaya jaring, alat tangkap dan terbatasnya pengetahuan tehnik menghalangi pemuda nelayan untuk melakukan praktek penangkapan ikan yang lestari.
- Kurangnya pengawasan yang efektif berarti si pelaku tidak takut ditangkap atau jika tertangkap mereka dengan mudah dapat menghindari hukuman karena menyogok atau kurangnya bukti-bukti
- Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan proyek dan program untuk mengatasi masalah diatas, untuk melindungi, merehabilitasi, mengelola dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya laut yang lestari. Beberapa yang menonjol di wilayah study dipaparkan sebagai berikut.

2.10.4 Proyek dan Kegiatan Lingkungan yang terkait di wilayah studi

(1) Proyek CoFish, Pinjaman ADB, tahun 1998 hingga tahun 2004.

Ini adalah proyek pengelolaan pesisir laut dengan kantor proyek di Selong. Saat ini kegiatan proyek dilakukan di Lombok bagian selatan timur dan pada masa yang akan datang akan diperluas ke pantai utara bagian timur Lombok dan pantai barat Sumbawa.

Proyek CoFish masih pada tahap awal dengan beberapa komponen yang sedang dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat nelayan setempat. Beberapa komponen proyek CoFish ini adalah:

- Pengelolaan sumber daya perikanan pesisir (CFRM)
- Pengembangan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (CDPR)
- Perbaikan Lingkungan Pusat Pendaratan Ikan
- Penguatan Kelembagaan/ pemberdayaan masyarakat

Beberapa kegiatan proyek yang direncanakan untuk di implementasikan pada tahun 2001 adalah:

- Penandaan wilayah Cagar alam ikan
- Awig awig
- Pengembangan masyarakat /bantuan mikro-kredit (LP2SD)
- Informasi dan pendidikan di sekolah-sekolah
- Membangun kesadaran melalui media (radio, films, wayang kulit, drama, poster, talk show, dsb)
- Bantuan/kegiatan suplai air
- Bantuan/kegiatan Puskemas
- Rehabilitasi pusat pendaratan ikan
- Bantuan jalan penghubung

(2) TNC (The Nature Conservancy)

Rencana pengelolaan 25 tahun untuk Taman Nasional Komodo.

Bagian dari rencana pengelolaan TNC untuk Taman Nasional Komodo(KNP) adalah untuk membangun kesadaran masyarakat setempat tentang ekosistem laut yang rentan karena kegiatan penangkapan yang merusak. Melalui program monitoring dan penegakan hukum, memperkenalkan kegiatan alternatif untuk penghidupan seperti budidaya rumput laut dan budidaya yang lainnya, mempromosikan praktek penangkapan yang lestari, tujuan dari rencana pengelolaan adalah untuk melindungi dan melestraikan lingkungan alam taman laut tersebut.

(3) COREMAP (Program pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu Karang)

AusAid mendanai proyek di wilayah Kabupaten Sikka untuk jangka waktu 3 tahun sejak April 2001.

Proyek COREMAP AusAid is a merupakan bagian dari program nasional COREMAP yang didanai bersama oleh pinjaman World Bank dan ADB. AusAid membantu sub-pilot

proyek pengelolaan yang berbasis masyarakat di NTT dan kapasitas building nasional dan sub-proyek training. Sub-pilot proyek pengelolaan yang berbasis masyarakat meliputi proses perencanaan yang partisipatif dengan stakeholders seperti pengguna sumberdaya, pemantauan secara terus-menerus dan kewenangan peraturan, perencana, lembaga pendukung teknis dan representatif masyarakat sipil.

(4) PERDA: Peraturan Daerah untuk melindungi/melestraikan terumbu karang

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi/melestraikan terumbu karang di Tiga Gili, didanai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan masih dalam proses diskusi. Kemungkinan pada akhir tahun ini, PERDA bisa disetujui.

(5) Forum lokal untuk masalah kelautan

Forum ini dibentuk sejak 3 tahun yang lalu, partisipannya adalah Gubernur, Bappeda, Dinas Perikanan, LSM (Yayasan Laut Biru), Universitas, organisasi profesional (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI). Salah satu output dari forum ini adalah Rencana strategis Pengelolaan Laut dan Pesisir (Coastal and Marine Management Strategic Plan).

2.10.5 Pelajaran/pengalaman dari proyek yang terkait

Tiga proyek utama diatas seperti Co-Fish di Lombok bagian selatan-timur, TNC di KNP, dan COREMAP AusAid, masih dalam tahap awal implementasi. Dari awal diskusi dengan personal proyek pelajaran yang dapat dipetik yang kemungkinan relevan dengan proyek ini adalah:

- Partisipasi aktif stakeholders khususnya masyarakat nelayan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang proyek. Tujuan proyek harus mendapatkan kesepakatan dan komitmen mereka.
- Kesadaran, pengertian dan motivasi masyarakat nelayan tentang perlindungan sumber daya laut harus dijelaskan guna mendisain komponen pengelolaan yang berbasis masyarakat yang cocok.
- Usaha yang sinambung dari masyarakat nelayan itu sendiri dibutuhkan sebagai konsep pengelolaan sumber daya yang kolaboratif meliputi komitmen dan keterlibatan masyarakat yang kuat. Identifikasi dan keterlibatan aktif dan komitmen tokoh/pimpinan masyarakat dengan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya perlindungan sumberdaya merupakan keharusan untuk implementasi dan kesinambungan jangka panjang suatu rencana pengelolaan sumberdaya yang kolaboratif.
- Penegakan hukum pada kegiatan penangkapan yang illegal hendaknya juga dilengkapi dengan ketersediaan cara penangkapan alternatif atau sumber penghidupan alternatif. Pemberian secara gratis peralatan tangkap kepada pelaku pengebomam ikan hendaknya dipikirkan secara hati-hati karena hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dari nelayan yang tidak melakukan penangkapan yang merusak dan ilegal.
- Awig-awig adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat yang mengatur praktek penangkapan yang diterima diantara mereka dan memberlakukan sanksi kepada pelanggarnya. Beberapa tempat telah membentuk awig-awig tentang wilayah tertentu untuk kegiatan khusus atau jenis penangkapan yang diatur (seperti menyelam, budidaya rumput laut, penangkapan menggunakan handline, wilayah yang terlarang, dsb.). Jadi, awig-awig dapat menjadi alat yang efektif untuk menurunkan praktek penangkapan yang merusak. Akan tetapi, awig-awig ini hendaknya direvisi dan disesuaikan dengan peraturan perikanan yang sudah ada. Semua pihak dan

stakeholders yang terkait dalam masyarakat hendaknya dilibatkan dalam merevisi dan menyusun awig-awig karena peraturan tersebut hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang dimiliki masyarakat dan tidak dipaksakan dari dan oleh pihak luar.

2.10.6 Isu Pembangunan Sektor Lingkungan

- Penyediaan suplai air minum untuk desa yang kekurangan kebutuhan dasar ini.
- Penanaman hutan bakau hendaknya dipromosikan bekerjasama dengan Departemen Kehutanan. Sejalan dengan kegiatan ini, kesadaran masyarakat dan mobilisasi untuk promosi perlindungan bakau hendaknya dilakukan guna menjamin kesinambungan jangka panjang program penanaman hutan bakau.
- Kegiatan patroli Dinas Perikanan bekerjasama dengan instansi terkait dengan basis yang lebih rutin hendaknya dilakukan guna memberantas kegiatan penangkapan yang merusak. Juga penerangan umum hendaknya dilakukan guna menginformasikan masyarakat nelayan tentang akibat kegiatan penangkapan yang merusak dan sanksi/hukuman bagi pelaku yang tertangkap melakukan kegiatan tersebut.
- Partisipasi masyarakat yang lebih besar hendaknya dibangun untuk pengelolaan dan perlindungan sumberdaya perikanan mereka. Hal ini membutuhkan penyuluhan perikanan dan dukungan masyarakat nelayan untuk mendidik dan mempromosikan pentingnya lingkungan pesisir dan terumbu karang.
- Untuk memberdayakan masyarakat nelayan, awig-awig dapat dibuat untuk mengelola dan mengontrol sumberdaya perikanan dan lingkungan mereka, untuk memberantas penangkapan yang merusak dan untuk membuat sanksi/hukuman kepada orang yang melanggar awig-awig tersebut.
- Pengelolaan limbah padat hendaknya dipromosikan kepada masyarakat nelayan dengan menciptakan sistem pengumpulan, pembakaran atau penanaman sampah organik di tempat yang ditetapkan. Tempat pembuangan ini hendaknya ditetapkan oleh masyarakat sendiri dan hendaknya pada lokasi yang jauh dari perumahan penduduk dan lokasi yang hembusan anginnya tidak ke arah desa.
- Alternatif sumber penghidupan yang tidak tergantung pada konsumsi penurunan sumberdaya hendaknya diinvestigasi dan dipromosikan. Karena perkembangan industri dan manufaktur pada masa yang akan datang, promosi eko-tourism mungkin menjadi sebuah alternatif di beberapa tempat untuk mendapatkan keuntungan dari keindahan lingkungan alam laut.
- Indikator nilai tambah dan penurunan kehilangan nilai ekonomis pasca panen akan dipromosikan kepada stakeholders guna melakukan praktek perlindungan dan tetap akan mendapat keuntungan dari pengurangan penggunaan sumber daya.
- Tantangan utama pada masa yang akan datang adalah untuk menjamin bahwa pengalaman pengelolaan dan pengetahuan yang diperoleh dari proyek yang terdahulu di NTB dan NTT dijabarkan dan dipertimbangkan dalam kebijakan ditingkat propinsi dan kabupaten. Mekanisme untuk menjamin ini adalah dengan menyusun rencana strategis di tingkat kabupaten untuk merefleksikan pengalaman dan pendekatan yang telah dikembangkan di proyek guna menyatukan rencana-rencana tersebut kedalam kebijakan dan visi ditingkat nasional. Ini akan membantu mendapatkan dukungan pemerintah untuk upaya-upaya pengelolaan masyarakat pesisir guna menjamin kesinambungan jangka panjang sumber daya alam mereka.
- Peningkatan dan indikator untuk mengatasi situasi kemiskinan masyarakat nelayan yang terpadu dengan strategi manapun yang bertujuan untuk pelestarian biodiversity dan penggunaan sumberdaya yang sinambung. Ada kebutuhan untuk menambah nilai pada sumberdaya sehingga pelestarian lebih menguntungkan ke masyarakat, seperti

- peningkatan pengolahan ikan dan kegiatan penambahan pendapatan yang lainnya.
- Konsep tentang akses yang terbuka akhirnya akan mengarah pada eksploitasi yang berlebihan khususnya ketika orang yang memiliki akses ke sumber daya yang terbatas meningkat dengan peningkatan kompetisi untuk memanen sumberdaya tersebut. Sistem akses yang terbuka perlu di rubah dan dimodifikasi ke sistem yang lebih sinambung dengan kesesuaian kepemilikan terdapat pada masyarakat nelayan.

2.11 Local Economy and Financial Condition of District Government

2.11.1 Karakteristik Ekonomi Daerah

Pada tahun 1999, GRDP (Gross Regional Domestic Product) di NTB sebesar Rp.8.2 triliun, dan di NTT sebesar Rp.5,6 triliun. GRDP per kapita di NTB sebesar Rp. 2.1 juta, dan di NTT sebesar 1,5 juta, sementara angka rata-rata nasional sebesar 5,4 juta pada tahun 1999. Persentase distribusi menurut industri dasar diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Distribusi GDP Harga yang berlaku menurut Industri dasar pada tahun 1999

	Indonesia	NTB	NTT
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	19,41	39,25	44,05
Didalam perikanan	2,29	3,34	3,21
Pertambangan & penggalan	9,90	3,77	1,51
Industri manufaktur	25,78	5,43	1,88
Listrik, gas & suplai air	1,19	0,30	0,71
Konstruksi	5,99	8,36	7,77
Perdagangan, hotel & restoran	16,51	17,23	17,58
Transportasi & komunikasi	5,97	9,86	7,73
Jasa Keuangan, pemilikan & usaha	6,36	1,91	3,48
Jasa	8,89	13,89	15,25

Sumber: Buku statistik tahunan Indonesia 1999, BPS
NTB Dalam nagka 2000, BPS NTB t
NTT Dalam Angka 1999, BPS NTT

Membandingkan dengan kondisi di seluruh Indonesia, sektor pertanian mendominasi kedua propinsi. Terkait dengan sektor perikanan, NTB memperlihatkan GRDP yang lebih besar dibandingkan NTT. Persentase distribusi menurut industri dasar di masing-masing kabupaten diperlihatkan pada Tabel 2.8.1.

- Di Kabupaten Sumbawa, sektor pertambangan memperlihatkan yang paling besar dan memberikan kontribusi ke NTB untuk mendapatkan alokasi royalty ekspor.
- Di Kabupaten Manggarai, Ngada dan Lembata, sektor pertanian mendominasi. Khususnya di Kabupaten Lembata, sub-sektor perikanan menunjukkan yang paling besar secara relatif.
- Terkait dengan sektor konstruksi, Kabupaten Flores Timur dan Lembata secara relatif mempunyai porsi yang kecil.
- Di Kabupaten Flores Timur, sektor jasa secara relatif menunjukkan yang paling besar.
- Di Kabupaten Ende, sektor perdagangan dan hotel/restaurant secara relatif menunjukkan yang paling besar, kontribusi dari sub-sektor pariwisata.

Angka pengangguran dikakulasikan sekitar 6,8% di NTB, dan sekitar 6,1% di NTT, sementara rata-rata nasional sekitar 6,5 %.

Ekspor NTB mengalami peningkatan tiga kali lipat pada tahun 1999 disebabkan oleh beroperasinya pertambangan tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat, sementara di NTT

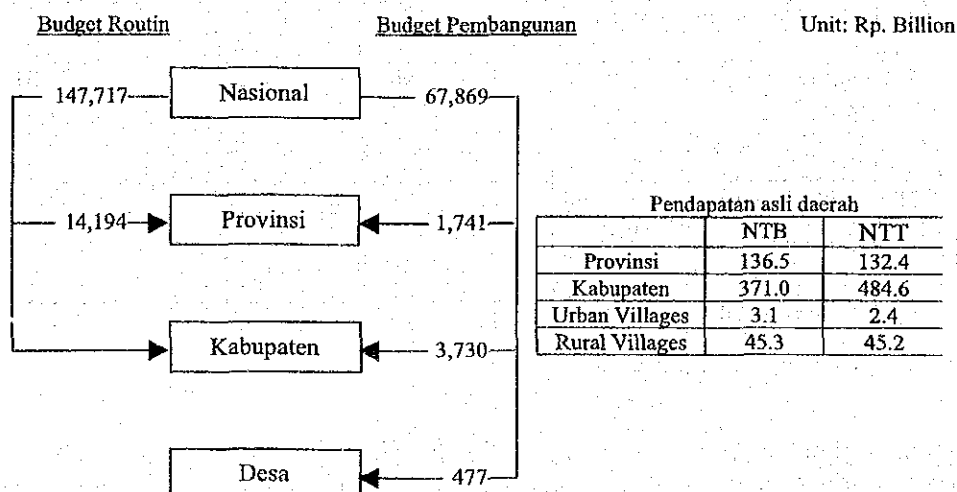
mengalami penurunan hingga kuartal tahun 1998.

Garis kemiskinan NTB sekitar Rp.74,677/kapita/bulan, dan NTT sekitar Rp.66.143/kapita/ bulan, sementara rata-rata nasional sekitar Rp.74.272/kapita /bulan di daerah pedesaan pada tahun 1999.

2.11.2 Sistem Keuangan Pemerintah Daerah dan pengaruh Otonomi Daerah

(1) Skala Budget

Skala nasional budget pada tahun fiskal 1998/1999 sekitar Rp. 147.717 triliun untuk dana rutin dan Rp. 67.869 triliun untuk dana pembangunan, secara total sebesar Rp.215.586 triliun. Subsidi untuk pemerintah daerah sekitar Rp.14,194 milyar untuk dana rutin (9,6% dari dana rutin), dan Rp.5,948 milyar untuk dana pembangunan (8,8% dana pembangunan). Total pendapatan di tingkat propinsi sekitar Rp.8,970 milyar, didalam pendapatan NTB sekitar Rp.136 trliun (1,5%) dan NTT sekitar Rp.132 triliun (1,5%). Pada sisi lain, total pendapatan di tingkat kabupaten sekitar Rp.20.854 triliun, didalam pendapatan kabupaten di NTB sekitar Rp.371 triliun (1,8%) dan di NTT sekitar Rp.485 triliun (2,3%).



Sumber: Buku Statistik Indonesia 1999, BPS

Budget pada 1998/1999

(2) Tahapan Otonomi Daerah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa di NTB secara relatif mengalami penurunan, tetapi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan dan sumber daya alam mengalami peningkatan secara tiba-tiba, kemungkinan karena mulai beroperasinya penambangan emas.

Pada sisi lain, Kabupaten Sikka, pendapatan asli daerahnya mengalami peningkatan sedikit, tetapi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan dan sumber daya alam tidak cukup meningkat, karenanya ketergantungan pada dana pusat menjadi semakin kuat. Selanjutnya, pendapatan Kabupaten Sumbawa pada APBD tahun 2001 sekitar 5.0 kali lipat pendapatan nyata tahun 1997/1998, dan Kabupaten Sikka sekitar 5,6 kali lipat, sementara NTB hanya sekitar 1,9 kali dari pendapatan nyata pada tahun 1997/1998.

Namun, dari data statistik masing-masing kabupaten, karakteristik kabupaten dapat

diringkas dalam Tabel berikut ini.

Karakteristik Situasi Keuangan menurut Kabupaten

Propinsi	Kabupaten	Budget per kapita (Rp. 1000)	Kontribusi PAD (%)	Kontribusi dana pembangunan (%)
NTB	Sumbawa	224,6	5,3	33,2
	Dompu	186,5	1,5	25,6
	Bima	142,7	3,6	18,4
NTT	Manggarai	98,2	3,2	17,2
	Ngada	210,1	3,6	31,2
	Ende	196,5	3,9	22,9
	Sikka	185,3	2,3	34,9
	Flores (T)	175,6	3,2	19,6
	Lembata	175,6	3,2	19,6

Di Kabupaten Sumbawa dan Ngada, skala budget per kapita secara relatif tinggi, sementara Kabupaten Manggarai kurang dari jumlah yang ada diketiga kabupaten tersebut. Memperhatikan kontribusi pendapatan asli daerah, Kabupaten Sumbawa menunjukkan tingkat yang sangat tinggi, sementara Kabupaten Dompu dan Sikka rendah. Kabupaten Sumbawa, Ngada dan Sikka memperlihatkan kontribusi yang tinggi terhadap dana pembangunan.

2.11.3 Budget untuk Sektor Perikanan

(1) NTB

Kegiatan pembangunan di sektor perikanan di tingkat propinsi berasal dari dua sumber yaitu dana APBD dan subsidi dari Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2000, dana pembangunan sektor perikanan di NTB sebesar Rp. 863 juta yang berasal dari APBD, sementara sebesar Rp. 187 juta disubsidi dari Pemerintah Pusat. Dana dari APBD jumlahnya sangat lebih besar.

Pada sisi lain, dana rutin sebesar Rp.1.484 juta, melebihi total dana pembangunan. Pendapatan sektor perikanan hanya sebesar Rp. 268 juta.

Dana rutin Propinsi NTB sebesar Rp. 100,2 triliun, sementara dana pembangunan pada tahun 2000 sebesar Rp. 120,5 triliun, jadi sektor perikanan mendapatkan sebesar 1,5 % dana rutin dan 0,7 % dana pembangunan menurut dasar propinsi. Pada fase pertama, sulit untuk mendapatkan Figur yang berurutan tentang subsidi dari Pemerintah pusat. Perubahan dana rutin dan dana pembangunan yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah diperlihatkan pada Tabel berikut ini.

Budget Sektor Perikanan NTB

(Unit: Rp. 1000)

	1998/1999	1999/2000	2000*	2001
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Alokasi
Pendapatan	29.607	29.508	267.610	n.a
- PPI	4.572	4.572	12.892	13.500
- BBI	22.610	22.610	22.117	23.575
- Lain-lain	2.425	2.326	232.602	n.a
Pengeluaran	794.713	1.493.064	2.854.971	1.846.633
- Rutin	598.813	851.140	1.514.674	1.232.905
- Pembangunan	195.900	641.924	1.340.297	613.728

Catatan: * dari April hingga Desember (9 bulan)

Sumber: Dinas Pendapatan of NTB

Tahun fiskal 2000 adalah tahun dimana NTB mendapatkan banyak pendapatan, tetapi masa yang akan datang, diprediksikan akan ada kompetisi dengan kabupaten karena proses otonomi. Untuk mendapatkan dana pembangunan yang cukup, perlu untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat.

(2) NTT

Pada tahun fiskal 1999/2000, dana pembangunan sektor perikanan yang dibiayai oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 655 juta, dan bantuan luar negeri untuk pembangunan PPI (OEFCF) sebesar Rp. 3.054 juta, sementara dana dari APBD sebesar Rp. 1.205 juta. Pada sisi lain, dana rutin sebesar Rp. 784 juta. Sebaliknya, pendapatan hanya sebesar Rp.52 juta.

1) Tingkat Kabupaten

Kegiatan pembangunan sektor perikanan di tingkat kabupaten terdiri atas dana dari APBD kabupaten, subsidi dari pemerintah pusat dan subsidi dari pemerintah propinsi. Figur yang berurutan tentang sumber keuangan di tingkat kabupaten hanya diperoleh di Kabupaten Sikka, dan ringkasannya dipaparkan pada Tabel berikut ini.

Perubahan Dana Pembangunan Sektor Perikanan di Kabupaten Sikka

Unit: Rp. 1000

	1998/1999	1999/2000	2000	2001
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Alokasi
Pemerintah Pusat	5.500	2.625	0	0
NTT	7.975	325	214.050	0
Kabupaten	19.938	0	191.393*	982.500*
Total	33.413	2.950	405.443	982.500

Catatan: * Dana Perimbangan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka

Pada sisi lain, perubahan dana rutin dan pendapatan dari sektor perikanan dipaparkan dalam Tabel berikut ini.

Perubahan Pendapatan dari Sektor Perikanan dan Dana Rutin di Kabupaten Sikka

Unit: Rp. 1000

	1998/1999	1999/2000	2000	2001
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Alokasi
Pendapatan	2.161	2.950	3.060	n.a.
Pengeluaran Rutin	124.124	142.725	391.665	n.a.
Biaya Personal	108.759	124.362	363.468	n.a.

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka

Tabel diatas mengindikasikan bahwa pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang untuk sektor perikanan di tingkat kabupaten.

Total dana rutin Kabupaten Sikka sebesar Rp. 32.815 juta, dan dana pembangunan sebesar Rp.15.746 juta pada tahun 2000; jadi kontribusi sektor perikanan dikalkulasikan sebesar 1,2%.

Tingkat kesulitan untuk mendapatkan dana pembangunan mungkin berbeda menurut superioritas atau inferioritas industri wilayah. Pada setiap kasus, diperlukan untuk menggambarkan keuntungan dan dampak guna mengalokasikan sumberdaya yang terbatas dalam proses otonomi. (Di Kabupaten Sikka kualitas diskripsi untuk empat proyek sektor perikanan telah dilakukan pada tahun 2001 seperti yang nampak pada Tabel berikut ini).

Keuntungan dan Dampak yang dipaparkan di Kabupaten Sikka

	Keuntungan	Dampak
Kapasitas Bangunan (Rp.50.000.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tingkat keterampilan nelayan • Peningkatan tingkat keterampilan staff pemerintah dalam bidang budidaya laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tangkapan ikan nelayan • Peningkatan kegiatan budidaya laut
Pembangunan Infrastruktur (Rp.500.000.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan umum (untuk nelayan yang mendaratkan ikan di TPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan • Lingkungan yang higienis dan produk dapat dijamin
Peningkatan Produksi (Rp.400.000.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi tangkapan ikan • Peningkatan produksi rumput laut • Peningkatan investasi perikanan • Peningkatan quality control produk perikanan • Peningkatan kemitraan usaha perikanan • Data perikanan akan tersedia dan akan dilayani dengan cepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan nelayan • Peningkatan pendapatan petani rumput laut • Peningkatan peluang kerja dari peningkatan kegiatan usaha perikanan • Peningkatan kualitas ikan untuk konsumsi, perdagangan antar pulau dan ekspor produk perikanan • Peningkatan kemitraan usaha perikanan • Data perikanan yang akurat dan validitas tinggi
Pengelolaan Sumberdaya (Rp.325.000.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan operasional sumber daya perikanan di wilayah pesisir Sikka • Peningkatan kesadaran masyarakat • TPI bisa dibangun di Paga pada 2002 berdasarkan survey dan disain yang telah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penangkapan ikan yang merusak dan pencurian ikan • peningkatkan kualitas sumberdaya penangkapan • peningkatan pendaratan ikan • peningkatkan pendapatan asli daerah dari fasilitas pendaratan ikan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka